

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB P2 DI KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

Tara Bunga Simanungkalit
Kantor Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi
e-mail: tara.simanungkalit@gmail.com

Abstrak

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam upaya pengoptimalan penerimaan pajak. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, tarif pajak, pemeriksaan pajak, penegakan hukum pajak dan pengetahuan pajak. Penulis melakukan pengujian apakah faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Bajenis. Tujuan Penelitian ini untuk menemukan alternatif solusi atas belum tercapainya target PBB P2 di Kecamatan Bajenis sejak tahun 2013-2015. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berapa besar keterkaitan faktor-faktor tersebut terhadap kepatuhan wajib Pajak PBB P2 di Kecamatan Bajenis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif analisis faktor. Hasil penelitian menunjukkan enam komponen tersebut memiliki korelasi yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak PBB P2. Ditemui beberapa hambatan dalam kepatuhan wajib pajak seperti: belum adanya Standar operasional prosedur (SOP) dan Standar pelayanan minimal (SPM), minimnya pengetahuan wajib pajak, minimnya pemeriksaan terhadap wajib pajak tidak patuh, dan penegakan hukum pajak yang belum mampu menyentuh wajib pajak tidak patuh secara merata.

Kata Kunci : Kepatuhan, Pajak Bumi dan Bangunan, Wajib Pajak

Analysis of Factors Compliance of Rural and Urban Land and Building Tax Payers (PBB P2) at Bajenis Sub-district Tebing Tinggi City, North Sumatera Province

Abstract

Taxpayer compliance is one among other important things that must be considered in an effort to optimize tax revenue. There are several factors affecting taxpayer compliance such as tax administration system conditions, services on the taxpayers, tax rates, tax audit, tax law enforcement, and tax knowledge factor. The researcher tried to identify whether these factors have an influence on the compliance of Rural and Urban Land and Building Tax Payers at Bajenis Sub-district. The purpose of testing the theory is to find alternative solution because the tax revenue target of Rural and Urban Land and Building Tax Payers at Bajenis Sub-district could not be achieved during 2013-2015. In addition, this research also tried to identify how far these factors were correlated with the compliance of Rural and Urban Land and Building Tax Payers at Bajenis Sub-district. The research employed a factor analysis quantitative method. The factor analysis method is used to identify which factors can improve the compliance of Rural and Urban Land and Building Tax Payers at Bajenis Sub-district. The factor analysis results showed that the six components had a strong correlation with the compliance of Rural and Urban Land and Building Tax payers. The existing constraints concerning the taxpayer compliance included: the absence of Standard Operating Procedures (SOP) and Minimum Service Standard (SPM), the lack of knowledge of the taxpayers, the lack of examinations over disobedient taxpayers, and the deficiency of tax law enforcement over disobedient taxpayers.

Keywords: Compliance, Rural and Urban Land and Building Tax, Tax payers

A. PENDAHULUAN

Pajak Daerah merupakan salah satu dari pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa yang termasuk pajak kabupaten terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Walet, Pajak Bumi Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Keistimewaan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) ini sendiri dikarenakan PBB P2 merupakan salah satu pajak yang baru dialihkan pengelolaan dan pemanfaatannya kepada daerah melalui Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sementara itu, pengelolaan PBB P2 di Kota Tebing Tinggi dimulai pada tahun

2014 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang PBB P2. Kemudian, terdapat keunggulan PBB P2 dibandingkan pajak daerah lainnya seperti nilai objek PBB P2 yang cenderung bertambah setiap tahunnya dikarenakan kebutuhan masyarakat akan tanah dan bangunan yang terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan manusia.

Sayangnya, pengelolaan PBB P2 di Kota Tebing Tinggi diduga masih belum maksimal. Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, realisasi penerimaan PBB P2 belum juga tercapai. Bahkan pada tahun 2015 realisasi penerimaan PBB P2 mengalami penurunan meski dengan target yang sama. Berikut data realisasi penerimaan PBB P2 di Kecamatan Bajenis:

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pbb P2 Kecamatan Bajenis

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2013	Rp770.088.310	Rp687.395.372	89.26%
2014	Rp814.007.725	Rp755.184.258	92.77%
2015	Rp814.007.725	Rp751.515.578	92.32%

Sumber: Laporan Realisasi Pajak Kecamatan Bajenis Tahun 2013- 2015.

Selain belum tercapainya target PBB P2 sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 di Kecamatan Bajenis tersebut, juga diperoleh data yang menunjukkan bahwa pada tahun 2014 realisasi penerimaan PBB P2 di Kecamatan Bajenis berada di posisi terendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kota Tebing Tinggi seperti berikut:

Tabel 2
Target Dan Realisasi Penerimaan Pbb P2 Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 (Rupiah)

No	Kecamatan	Target	Realisasi	Persentase
1	Tebing Tinggi Kota	1.365.563.944	1.439.326.037	104.74 %
2	Rambutan	1.007.263.982	1.095.956.851	101.74 %
3	Padang Hilir	968.122.242	962.799.659	99.45 %
4	Bajenis	814.007.725	755.184.258	92.77 %
5	Padang Hulu	770.542.107	777.582.979	100.33 %

Sumber: Laporan realisasi penerimaan PBB P2 Kota Tebing Tinggi Tahun 2014.

Sehubungan dengan permasalahan perolehan PBB P2 di Kecamatan Bajenis tersebut, Rahayu (2010: 137) mengatakan "Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan sebenarnya". Terkait dengan hal tersebut, penulis menemukan adanya beberapa fenomena yang mengindikasikan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB P2 di Kecamatan Bajenis seperti berikut:

- 1) Adanya indikasi wajib pajak kurang patuh dalam melaporkan perubahan kondisi objek PBB

P2 di Kecamatan Bajenis. Hal ini terlihat dari pengamatan peneliti sebelumnya di mana belum ditemukannya wajib pajak yang melaporkan perubahan kondisi objek pajaknya.

- 2) Terdapat beberapa wajib pajak PBB P2 di Kecamatan Bajenis belum membayar pajak terutang tepat pada waktunya. Sisa piutang PBB P2/tunggakan sebesar Rp 2.032.180.338 yang mana rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Data Tunggakan Pbb P2 Di Kecamatan Bajenis S/D Tahun 2015

No	Kelurahan	Jatuh Tempo	Sisa Piutang
1	B. Sakti	Rp 1.261.086.014	Rp 341.206.925
2	Berohol	Rp 2.147.559.358	Rp 30.797.890
3	Bulian	Rp 1.808.296.286	Rp 596.500.567
4	Durian	Rp 1.503.786.917	Rp 501.011.472
5	Pelita	Rp 464.456.406	Rp 99.273.826
6	P.Mancung	Rp 1.043.382.847	Rp 354.891.544
7	T. Karang	Rp 455.902.978	Rp 108.498.114
Jumlah		Rp 8.684.470.806	Rp 2.032.180.338

Sumber: Laporan realisasi penerimaan PBB P2 Kota Tebing Tinggi Tahun 2014.

Selain tunggakan PBB P2 tersebut diatas, adanya sanksi PBB P2 juga mengindikasikan beberapa wajib pajak PBB P2 masih belum membayar pajak terutang secara tepat waktu. Jumlah sanksi/denda PBB P2 di Kecamatan Bajenis sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp. 271.386.075 seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 4
Sanksi Denda Pbb P2 Kecamatan Bajenis Sampai Tahun 2015

No	Kecamatan	Sanksi Denda
1	Bandar Sakti	Rp 60.535.564
2	Berohol	Rp 30.797.890
3	Bulian	Rp 65.415.848
4	Durian	Rp 52.656.788
5	Pelita	Rp 12.127.530
6	Pinang Mancung	Rp 38.292.789
7	Teluk Karang	Rp 11.559.666
Jumlah		Rp 271.386.075

Sumber: Laporan Sanksi Denda PBB P2 Kota Tebing Tinggi Tahun 2015.

Melihat adanya indikasi belum patuhnya wajib pajak PBB P2 di Kecamatan Bajenis dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maka timbul ketertarikan penulis untuk memilih fokus penelitian yang penulis tetapkan adalah faktor-faktor apa sajakah yang bisa mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak PBB P2. Hal ini dilakukan untuk menemukan informasi yang tepat yang dapat digunakan untuk membantu mengoptimal-kan penerimaan PBB P2 dalam rangka intensifikasi penerimaan PBB P2 di Kecamatan Bajenis.

B. LANDASAN TEORITIS

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Di Indonesia sendiri, *Tax on land and property* atau dikenal dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dulunya merupakan pajak pusat. Melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah dilimpahkan pengelolaannya kepada daerah kabupaten/kota sekaligus menjadi salah satu sumber PAD. Abuyamin (2014: 427) mengemukakan bahwa "Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak atas bumi dan atau bangunan dikenakan terhadap subyek pajak orang pribadi atau badan yang secara nyata : (a) mempunyai hak atau memperoleh manfaat atas bumi dan; atau (b) memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan".

Sementara itu, yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Pasal 77 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

- 1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
 - a) jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b) jalan tol;
 - c) kolam renang;
 - d) pagar mewah;
 - e) tempat olahraga;
 - f) galangan kapal, dermaga;
 - g) taman mewah;
 - h) tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i) menara.
- 3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
 - a) digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam,

- hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e) digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f) digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Safri Nurfantu (Rahayu, 2010: 138) mengatakan bahwa "Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya". Kemudian kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D Nowak (Rahayu, 2010: 138) seperti berikut ini:

- 1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan dengan lengkap dan jelas;
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
- 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2010: 140) adalah kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum pajak, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Sementara itu, Lars Fallan (Rahayu, 2010) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi juga oleh pengetahuan. Faktor-faktor kepatuhan pajak tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Kondisi Sistem Administrasi Perpajakan.

Menurut Rahayu (2010: 92) "Sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatu yang terdiri dari unsur *Tax Policy*, *Tax Law*, dan *Tax Administration* yang saling berhubungan satu sama lain, bersinergi, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan negara dalam target perolehan penerimaan pajak secara optimal", Sementara pengertian kondisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah "1. persyaratan; 2. keadaan".

Dari pernyataan-pernyataan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kondisi sistem administrasi perpajakan dapat diartikan sebagai keadaan dimana cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak yang terdiri dari pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan penagihan pajak saling berhubungan satu sama lain.

2) Pelayanan pada Wajib Pajak

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-Pan) No. 81 tahun 1993 (Rahayu, 2010: 134) mengartikan pelayanan publik sebagai berikut: "Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan di lingkungan BUMN/D dalam bentuk barang atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan".

Selanjutnya Rahayu (2010: 134) mengatakan persamaan pelayanan pajak dengan pelayanan publik seperti berikut:

- a) Dilaksanakan oleh instansi pemerintah
- b) Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan
- c) Tidak berorientasi pada laba.

3) Penegakan Hukum Pajak

Rahayu (2010: 244) mengemukakan bahwa "Penegakan hukum di bidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan seperti menyampaikan SPT. Pembukuan dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak pada waktunya. Sarana penegakan hukum dapat meliputi sanksi atas kelalaian menyampaikan SPT, bunga yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran dan dakwaan pidana dalam hal terjadi penyelundupan pajak".

4) Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak (*tax audit*) merupakan salah satu pencegahan dari penyelundupan pajak (*tax evasion*). Pengertian Pemeriksaan menurut Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu : "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

5) Tarif pajak.

Menurut Rafael Reuveny (Tiana, 2012: 43) "Tarif sebagai bagian dari kebutuhan pemberi pelayanan atau penghasil produk sebagai sumber penerimaan pemerintah. Penetapan tarif yang didesain secara baik dapat menjadi sumber

finansial yang penting dalam menyampaikan pelayanan dan mendorong penggunaan konsumsi yang mendorong penggunaan yang tidak boros". Terkait dalam hal penetapan tarif PBB P2, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah kemampuan wajib pajak untuk membayar (*ability to pay*). Menurut Seligman (Rahayu, 2010: 65) alat untuk menguji *ability to pay* seseorang itu adalah:

- a) Kemampuan seseorang untuk membayar pajak dilihat dari pengeluaran yang dilakukan. Dengan pengeluaran yang dilakukan maka dianggap mampu untuk membayar pajak. Tentunya pengenaan pajaknya pun adalah relative, sesuai dengan besaran pengeluaran seseorang (*expenditure*);
- b) Kekayaan yang dimiliki seseorang akan menunjukkan kemampuan membayar pajak (*Property*);
- c) Harta kekayaan yang dapat menghasilkan penghasilan seseorang, maka ia akan dianggap mampu untuk membayar pajak (*Product*);
- d) Penghasilan seseorang semakin banyak maka ia dianggap mampu untuk membayar pajak (*Income*).

6) Pengetahuan Pajak

Lars Fallan (Rahayu, 2010: 141) mengatakan "Aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya kepatuhan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak". Dari kajian diatas dapat diartikan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada penelitian tersebut. Notoatmodjo (2007: 140) menjelaskan bahwa "Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan suatu kejadian tertentu. Penginderaan terjadi melalui pancaindera suatu kejadian tertentu. Penginderaan terjadi melalui pancaindera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga".

C. METODE

Menurut Setiawan (2005:380) "Pada prinsipnya analisis faktor digunakan untuk mereduksi data, yaitu proses untuk meringkas sejumlah variabel menjadi lebih sedikit dan menamakannya sebagai faktor". Analisis faktor terdiri dari dua jenis yaitu analisis faktor eksploratori (*Exploratory Factor Analysis/EFA*) dan analisis faktor konfirmatori (*Confirmatory factor analysis/CFA*). Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis konfirmatori dimana variabel pada skripsi ini ditentukan berdasarkan teori yang sudah ada mengenai kepatuhan wajib pajak. Hair et al. (1998:1) mengatakan: "Confirmatory factor analysis is a statistical technique used to verify the factor structure of a set of observed variables. CFA allows the researcher to test the hypothesis that a relationship between observed variables and their underlying latent construct exist. The researcher uses knowledge of the theory, empirical research, or both, to postulate the relationship pattern a priori and then tests the hypothesis statistically."

Adapun tahapan-tahapan pengujian di dalam teknik analisis faktor pada skripsi ini adalah: **Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and Bartlett's test.**

KMO and Bartlett's test merupakan ukuran kecukupan sampling di mana bila nilai *KMO* kecil, maka analisis faktor kurang cocok untuk dilakukan. Hasil uji *KMO and Bartlett's test* atas komponen tersebut dinilai layak atau tidak dengan melihat:

1. *KMO MSA* > 0,5

The other overall test is the measure of sampling adequacy (MSA), which in this case falls in the unacceptable range (under 0,50 (Hair et al, 1998:122)

2. *Chi-square probability* > 0,05 (Diana :10)

3. Kaiser (1974) mencirikan ukuran *KMO* sebagai berikut:

- a) *Marvelous* (0,90)
- b) *Meritorius* (0,80)
- c) *Middling* (0,70)
- d) *Mediocre* (0,60)
- e) *Miserable* (0,50)
- f) *Unacceptable* (<0,50)

MSA (Measure of Sampling Adequacy)

Setelah komponen lulus uji *KMO and Bartlett's test*, kemudian dihitung ukuran kecukupan sampling masing-masing variabel dengan uji *anti image matrices* menggunakan SPSS 20. Atribut yang memiliki nilai *a (MSA)* > 0,5 layak untuk diproses lebih lanjut. Namun atribut yang memiliki nilai *a* < 0,5 harus direduksi. Sementara itu atribut yang tersisa diuji ulang kembali dari tahap awal.

Communalities

Tahap selanjutnya adalah menguji korelasi setiap komponen terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dengan uji *communalities*. Hasil dari uji

communalities ini kemudian ditafsirkan/diinterpretasikan ke dalam suatu kriteria penilaian untuk melihat bagaimana derajat korelasi/hubungan masing-masing faktor terhadap kepatuhan wajib pajak. Kriteria penilaian yang digunakan penulis adalah kriteria skala Guilford.

Ekstraksi Faktor

Ekstraksi faktor adalah cara lain untuk menganalisis faktor sebagai tahapan yang bertujuan untuk menghasilkan sejumlah faktor baru dari data yang ada. Ada beberapa cara dalam melakukan ekstraksi faktor, salah satunya dengan menggunakan metode analisis komponen utama (*principal componen analysis*). Metode analisis komponen utama ini menggunakan uji *variance explained* pada spss 20. Kriteria yang digunakan dalam menentukan banyaknya faktor yang terbentuk adalah dengan kriteria *latent root eigenvalue*, dimana hanya faktor yang akar latennya > 1 dianggap signifikan (Setiawan, 2005:382).

Rotation and Factoring

Rotation and factoring digunakan untuk mempermudah interpretasi (tafsiran) dalam menentukan variabel-variabel mana saja yang tercakup dalam suatu faktor bila terbentuk lebih dari satu kategori baru. Pada Skripsi ini metode yang digunakan adalah rotasi *varimax*. Rotasi *varimax* adalah metode rotasi yang mengurutkan faktor berdasarkan nilai terbesar ke faktor terkecil.

D. PEMBAHASAN

1. Kondisi Sistem Administrasi Perpajakan

Komponen kondisi sistem administrasi perpajakan terdiri dari empat atribut pernyataan (*x1, x2, x3, dan x4*). Dengan pengujian *KMO and Bartlett's test* maka diperoleh nilai *KMO MSA* sistem administrasi perpajakan sebesar 0,685 (*level mediocre*) dengan signifikansi 0,000. Oleh karena nilai *KMO* yang diperoleh > 0,5 dan signifikansi dibawah 0,5 maka kumpulan atribut tersebut layak dianalisis lebih lanjut. Rincian hasil pengujian kelayakan komponen kondisi sistem administrasi perpajakan diuraikan pada tabel *KMO and Bartlett's test* berikut ini.

Tabel 5
Kmo And Bartlett's Test

<i>Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.</i>		0.685
<i>Bartlett's Test of Sphericity</i>	<i>Approx. Chi-Square</i>	311.259
	<i>Df</i>	6
	<i>Sig.</i>	0.000

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner menggunakan program SPSS 20.

Selanjutnya penulis melakukan analisis terhadap empat atribut tersebut dengan melihat *anti image matrices*. Dari angka-angka yang ditampilkan tampak bahwa semua nilai *a (MSA)* memiliki nilai >

0,5. Hasil uji *anti image matrices* yaitu x11 dengan a 0,697, x12 dengan nilai 0,700, x13 dengan nilai 0,663, dan x14 dengan nilai 0,681. Artinya seluruh atribut memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam proses selanjutnya. Berikut rincian tabel *anti image Matrices* Komponen Kondisi Sistem Administrasi Perpajakan.

Tabel 6
Anti-Image Matrices

	x11	x12	x13	x14
Anti-image Correlation	0.697 ^a	-0.729	0.009	-0.093
	x12	-0.729	0.700 ^a	0.013
	x13	0.009	0.013	0.663 ^a
	x14	-0.093	-0.204	-0.793
			-0.793	0.681 ^a

Sumber: Hasil Pengolahan data kuesioner menggunakan program SPSS 20.

Proses selanjutnya yang dilakukan adalah uji *communalities*. Hasil uji *Communalities* disajikan sebagai berikut:

Tabel 7
Communalities

Penjelasan Setiap atribut	Hasil Ekstraksi	Korelasi
Prosedur penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (x14)	0.797	Kuat
Prosedur pelaporan yang mudah dipahami (x12)	0.749	Kuat
Prosedur pendaftaran sederhana (x11)	0.703	Kuat
Prosedur pembayaran pajak yang baik (x13)	0.694	Cukup kuat
<i>Mean</i>	0.736	Kuat

Sumber: Hasil Pengolahan data kuesioner menggunakan program SPSS 20.

Dari tabel *communalities* di atas diketahui tiga atribut berpengaruh kuat terhadap kepatuhan wajib pajak seperti prosedur penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prosedur pelaporan yang mudah dipahami, dan prosedur pendaftaran sederhana.

Proses selanjutnya adalah ekstraksi yang bertujuan untuk menghasilkan sejumlah faktor dari kondisi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2.943	73.575	73.575	2.943	73.575	73.575
2	0.749	18.728	92.303			
3	0.174	4.353	96.656			
4	0.134	3.344	100.000			

Sumber: Laporan realisasi penerimaan PBB P2 Kota Tebing Tinggi Tahun 2014.

Dari tabel tersebut terlihat hanya satu kelompok faktor saja yang terbentuk dari komponen kondisi sistem administrasi perpajakan. Ini dapat dilihat dari *initial eigenvalues* untuk total yang bernilai > 1 hanya ada 1 kategori (kelompok). Selanjutnya dijelaskan bahwa kontribusi variansi kondisi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib PBB P2 dari proses ekstraksi ini diperoleh sebesar 73,575%.

Tabel 9
Component Matrix a

	Component
	1
x11	0.839
x12	0.865
x13	0.833
x14	0.893

Sumber: Hasil Pengolahan data kuesioner menggunakan program SPSS 20.

Tabel *component matrix a* di atas menjelaskan bahwa hanya satu kategori faktor saja yang terbentuk dalam proses ekstraksi sebelumnya. Faktor tersebut diinterpretasikan pada kolom *component 1*.

2. Pelayanan pada Wajib Pajak

Langkah-langkah analisis faktor yang kita lakukan pada komponen sebelumnya juga kita lakukan pada komponen pelayanan pada wajib pajak ini. Penulis memasukkan seluruh atribut yang valid (x21,x22,x23,x24,x25,x26,x27, dan x211) namun hasilnya adalah nilai KMO tidak muncul. Penulis menguji ulang kembali satu persatu tanpa atribut x21, pengujian selanjutnya tanpa x22, seterusnya sampai x211. Kemudian penulis menemukan sebuah atribut yang tidak layak yaitu x24 karna *eigenvalues* x24 bernilai negatif. *Eigenvalues* bernilai negatif mengartikan bahwa atribut tersebut tidak stabil berada pada komponen tersebut sehingga penulis mereduksi atribut. Penulis menganalisis atribut x24 tidak stabil dikarenakan terdiri dari dua sikap yang tidak sama dalam sebuah pernyataan tersebut yaitu adil dan jujur. Menurut penulis sikap petugas penagihan sanksi denda yang adilbelum tentu seiring dengan perilaku jujur. Selanjutnya penulis melakukan pengujian tanpa x24, hasil yang diperoleh KMO bernilai 0,691 dengan signifikansi 0,000. Setelah seluruh atribut dianggap layak penulis melanjutkan ke tahap selanjutnya penulis menemukan satu atribut lagi memiliki nilai MSA < 0.5 yaitu atribut x211 dengan nilai a 0,320. Korelasi faktor ini terlalu rendah hal ini mungkin karena penggunaan e-sistem perpajakan PBB P2 di Kecamatan Bajenis masih sangat minim. Penulis pun mereduksi x211. Maka, hasil pengujian akhir dirincikan pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 10
Kmo And Bartlett's Test

<i>Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.</i>		0.660
<i>Bartlett's Test of Sphericity</i>	<i>Approx. Chi-Square</i>	276.700
	<i>Df</i>	15
	<i>Sig.</i>	0.000

Sumber: Hasil Pengolahan data kuesioner menggunakan program SPSS 20.

Pada tabel tersebut nilai KMO diatas 0,5 dengan signifikansi 0,000 sehingga komponen ini dianggap layak untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Nilai KMO pada komponen ini adalah 0,660 (*mediocre*).

Tabel 11
Anti-Image Matrices

		x21	x22	x23	x25	x26	x27
Anti-image Correlation	x21	0.700*	-0.297	-0.083	-0.264	0.279	-0.191
	x22	-0.297	0.656*	-0.675	0.014	-0.430	-0.020
	x23	-0.083	-0.675	0.611*	0.041	0.180	0.067
	x25	-0.264	0.014	0.041	0.696*	-0.604	0.033
	x26	0.279	-0.430	0.180	-0.604	0.601*	-0.339
	x27	-0.191	-0.020	0.067	0.033	-0.339	0.791*

Sumber: Hasil Pengolahan data kuesioner menggunakan program SPSS 20.

Pada tabel pengujian nilai MSA ini, terlihat semua atribut memiliki nilai $a(MSA) > 0,5$. Nilai MSA seluruh atribut pada komponen pelayanan pada wajib pajak yaitu : x21 dengan 0,700, x22 dengan 0,656, x23 dengan 0,611, x25 dengan 0,696, dan x27 dengan 0,601. Dengan demikian, semua atribut layak untuk diuji *communalities*. Hasil uji *Communalities* komponen disajikan sebagai berikut:

TABEL 12
COMMUNALITIES

Penjelasan Setiap atribut	Hasil Ekstraksi	Korelasi
Petugas pajak memberi informasi dengan lengkap dan jelas (x22)	0.835	Kuat
Lokasi pembayaran mudah dijangkau. Ms. Dekat dari rumah (x26)	0.823	Kuat
Pemungut pajak datang disaat yang tepat. Misal, saat gaji (x23)	0.816	Kuat
Pembayaran bisa dilakukan dengan banyak cara (x25)	0.717	Kuat
Petugas pajak ramah (x21)	0.537	Cukup kuat
Pelayanan pajak tepat waktu (x27)	0.535	Cukup kuat
Mean	0.717	Kuat

Sumber: Hasil Pengolahan data kuesioner menggunakan program SPSS 20.

Dari tabel *communalities* di atas dijelaskan bahwa pada komponen ini terdapat empat atribut yang berpengaruh kuat terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu petugas pajak memberi informasi dengan lengkap dan jelas, lokasi pembayaran mudah dijangkau. misal; dekat dari rumah, pemungut pajak datang disaat yang tepat. Misal, saat gaji, dan pembayaran bisa dilakukan dengan banyak cara.

Sementara itu, dua atribut lain yang pengaruhnya cukup kuat terhadap kepatuhan pajak adalah petugas pajak ramah dan pelayanan pajak tepat waktu. Dengan demikian diperoleh rata-rata korelasi komponen ini terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 0,717. Hal itu menandakan bahwa komponen pelayanan pada wajib pajak berpengaruh kuat terhadap kepatuhan wajib pajak.

Proses selanjutnya adalah ekstraksi seluruh komponen untuk yang bertujuan untuk menghasilkan sejumlah faktor dari data yang ada. Hasil ekstraksi komponen pelayanan pada wajib pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Total Variance Explained

Com ponent	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	3.013	50.221	50.221	3.013	50.221	50.221
2	1.249	20.820	71.041	1.249	20.820	71.041
3	0.700	11.660	82.702			
4	0.607	10.112	92.814			
5	0.266	4.433	97.247			
6	0.165	2.753	100.000			

Sumber: Hasil Pengolahan data kuesioner menggunakan program SPSS 20.

Pada tabel tersebut terlihat dua komponen yang memiliki nilai *initial eigenvalues* > 1. Hal tersebut menandakan terbentuknya 2 kategori komponen baru dari atribut pelayanan pada wajib pajak yang ada. Selanjutnya dijelaskan bahwa kontribusi varians pelayanan pada wajib pajak terhadap kepatuhan wajib PBB P2 dari proses ekstraksi tersebut sebesar 71,041%. Berikut rincian kedua kategori faktor yang terbentuk pada komponen ini.

Tabel 14
Rotated Component MatrixA

	Component	
	1	2
x21	0.189	0.708
x22	0.406	0.819
x23	0.006	0.903
x25	0.822	0.204
x26	0.887	0.193
x27	0.725	0.097

Sumber: Hasil Pengolahan data kuesioner menggunakan program SPSS 20.

Berdasarkan hasil rotasi pada tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa seluruh atribut yang bersesuaian sudah menempati posisi masing-masing pada komponen baru. Hasil ekstraksi pada komponen pelayanan wajib pajak menghasilkan % varians sebagai berikut:

- a. Varians Faktor yang masuk dalam kategori I (Faktor I) adalah sebesar 50,221%. Faktor ini terdiri dari atribut:
 - 1) Petugas pajak memberi informasi dengan lengkap dan jelas;
 - 2) Petugas pajak memahami kebutuhan wajib pajak. Misalnya, Pemungut pajak datang disaat yang tepat/ saat gaji;
 - 3) Petugas Pajak ramah.

- b. Varians Faktor yang masuk dalam kategori II (Faktor II) adalah sebesar 20,820%. Faktor ini terdiri dari atribut:
- Lokasi pembayaran mudah dijangkau, Ms. Dekat dari rumah;
 - Pembayaran bisa dilakukan dengan banyak cara;
 - Pelayanan pajak tepat waktu.

3. Tarif Pajak

Tabel 15
Kmo And Bartlett's Test

<i>Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.</i>		0.910
<i>Bartlett's Test of Sphericity</i>	<i>Approx. Chi-Square</i>	779.580
	<i>Df</i>	21
	<i>Sig.</i>	0.000

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner menggunakan program SPSS 20.

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai KMO and *Bartlett's test* > 0,5 yaitu 0,910 (*Marvelous*). Hal tersebut menandakan atribut-atribut untuk komponentarif pajak layak untuk diproses lebih lanjut.

Tabel 16
Anti-Image Matrices

		x31	x32	x33	x34	x35	x36	x37	
<i>Anti-image</i>	x31	0.896*	-0.553	-0.073	-0.064	-0.259	-0.167	-0.188	
	x32	-0.553	0.867*	-0.124	-0.478	0.029	0.036	-0.009	
	<i>Correlati</i>	x33	-0.073	-0.124	0.932*	-0.274	0.048	-0.223	-0.329
		x34	-0.064	-0.478	-0.274	0.900*	-0.046	0.049	0.145
	x35	-0.259	0.029	0.048	-0.046	0.948*	-0.257	-0.109	
	x36	-0.167	0.036	-0.223	0.049	-0.257	0.924*	-0.341	
	x37	-0.188	-0.009	-0.329	0.145	-0.109	-0.341	0.916*	

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner menggunakan program SPSS 20.

Berdasarkan data tabel *anti image matrices* diatas, dapat dilihat bahwa semua atribut pada komponen ini memiliki nilai *MSA* > 0,5. X31 dengan nilai a 0,896, x32 dengan nilai 0,867, x33 dengan nilai 0,932, x34 dengan nilai 0,900, x35 dengan nilai 0,948, x36 dengan nilai 0,924 dan x37 dengan nilai 0,916. Karena semua atribut memiliki nilai *MSA* > 0,5 maka kumpulan atribut dari komponen ini layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Proses selanjutnya adalah melihat keeratan hubungan sebab akibat dari masing-masing atribut pada komponen tarif. Rincian keeratan hubungan masing-masing atribut tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Communalities

Penjelasan Setiap atribut	Hasil Ekstraksi	Korelasi
Tarif PBB P2 wajar (x31)	0.889	Kuat
Tidak Memberatkan ekonomi rumah tangga (x32)	0.835	Kuat
Nilai jual objek tidak kena pajak (NJOTKP) sudah adil untuk ekonomi lemah (x33)	0.821	Kuat
Biaya administrasi pajak gratis (x36)	0.760	Kuat
Biaya transportasi berkaitan pemenuhan kewajiban wajar (x37)	0,755	Kuat
Denda telat bayar murah (x34)	0.711	Kuat
Tarif denda sesuai dengan peraturan perundangundangan (x35)	0.665	Cukup kuat
<i>Mean</i>	0.777	Kuat

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner menggunakan program SPSS 20.

Berdasarkan *communalities* di atas, dijelaskan bahwa pada komponen ini terdapat enam atribut yang berpengaruh kuat terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu tarif PBB P2 wajar, tidak memberatkan ekonomi rumah tangga, nilai jual objek tidak kena pajak (NJOTP) sudah adil untuk ekonomi lemah, biaya administrasi pajak gratis, biaya transportasi berkaitan pemenuhan kewajiban wajar, dan denda telat bayar murah.

Sementara itu, satu atribut lain yang pengaruhnya cukup kuat terhadap kepatuhan pajak adalah tarif denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian rata-rata korelasi komponen ini terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,777. Hal itu menandakan komponen tarif pajak kuat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Tabel 18
Total Variance Explained

<i>Component</i>	<i>Initial Eigenvalues</i>			<i>Extraction Sums of Squared Loadings</i>		
	<i>Total</i>	<i>% of Variance</i>	<i>Cumulative %</i>	<i>Total</i>	<i>% of Variance</i>	<i>Cumulative %</i>
1	5.435	77.637	77.637	5.435	77.637	77.637
2	0.572	8.170	85.808			
3	0.368	5.254	91.062			
4	0.199	2.845	93.907			
5	0.192	2.739	96.646			
6	0.152	2.174	98.820			
7	0.083	1.180	100.000			

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner menggunakan program SPSS 20.

Berdasarkan tabel *total variance explained* terlihat bahwa hanya satu komponen faktor baru yang terbentuk dari seluruh atribut yang ada. Hal ini dilihat dari komponen yang bernilai *initial eigenvalues* > hanya satu faktor saja. Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa proses ekstraksi pada komponen tarif pajak menghasilkan varians kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak PBB sebesar 77,637%.

Berikut ini posisi masing-masing atribut terhadap komponen baru yang terbentuk.

Tabel 19
Component Matrix a

	Component
	1
x31	0.943
x32	0.914
x33	0.906
x34	0.843
x35	0.816
x36	0.872
x37	0.869

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner menggunakan program SPSS 20.

4. Penegakan Hukum Pajak

Langkah-langkah yang kita lakukan pada komponen sebelumnya juga kita lakukan pada komponen penegakan hukum pajak ini. Adapun rincian hasil pengujian disajikan pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 20
Kmo And Bartlett's Test

<i>Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.</i>		0.500
<i>Bartlett's Test of Sphericity</i>	<i>Approx. Chi-Square</i>	43.125
	<i>Df</i>	1
	<i>Sig.</i>	0.000

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner menggunakan program SPSS 20.

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *KMO and Bartlett's test* 0,500 (*miserable*) dengan signifikansi 0,000. Hal tersebut menandakan atribut-atribut untuk komponen penegakan hukum pajak layak diproses lebih lanjut.

Tabel 21
Anti-Image Matrices

		x41	x42
<i>Anti-image Correlation</i>	x41	0.500^a	-0.579
	x42	-0.579	0.500^a

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner menggunakan program SPSS 20.

Dari tabel *anti image matrice* di atas, dapat dilihat bahwa semua atribut pada komponen ini memiliki nilai *MSA* yang sama yaitu x41 dengan nilai 0,500 dan x2 dengan nilai 0,500. Meskipun tidak ada perbedaan antar kedua atribut, analisis lebih lanjut dapat dilakukan karena nilai *MSA* 0,500 (*miserable*). Selanjutnya untuk melihat bagaimana keeratan hubungan sebab akibat masing-masing atribut terhadap kepatuhan wajib pajak, semua atribut diuji dengan uji *communalities* seperti berikut ini:

Tabel 22
Communalities

Penjelasan Setiap atribut	Hasil Ekstraksi	Korelasi
Pemberian sanksi kepada wajib pajak adil. Mis. Tidak tebang pilih dalam menegakan hukuman (x41)	0.790	Kuat
Penegakan hukum konsisten. Mis. Tercapai atau tidak realisasi pajak, pelanggar aturan tetap diadili (x42)	0.790	Kuat
<i>Mean</i>	0.790	Kuat

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner menggunakan program SPSS 20.

Berdasarkan *communalities* di atas, dijelaskan kedua atribut pada komponen ini berpengaruh kuat terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu pemberian sanksi kepada wajib pajak adil. Mis. Tidak tebang pilih dalam menegakan hukuman dan penegakan huku konsisten. Mis. Tercapai atau tidak realisasi pajak, pelanggar aturan tetap diadili. Dengan demikian komponen penegakan hukum pajak kuat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Bajenis.

Tabel 23
Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	1.579	78.963	78.963	1.579	78.963	78.963
2	0.421	21.037	100.000			

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner menggunakan program SPSS 20.

Tabel diatas menjelaskan bahwa hanya satu faktor saja yang terbentuk dari komponen penegakan hukum pajak ini. Namun varians kontribusi komponen ini terhadap kepatuhan wajib pajak cukup besar yaitu 78,963 %. Untuk melihat posisi masing-masing atribut yang terbentuk dalam komponen yang bersesuaian maka penulis menyajikan dalam tabel *component matrix a*. Tabel *component matrix a* memperlihatkan keseluruhan komponen berada pada kolom komponen 1 seperti yang terinci dalam tabel berikut:

Tabel 24
Component Matrixa

	Component
	1
x41	0.889
x42	0.889

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner menggunakan program SPSS 20.

5. Pemeriksaan Pajak

Langkah-langkah yang kita lakukan pada komponen sebelumnya juga kita lakukan pada komponen pemeriksaan pajak ini. Namun pada tahap uji korelasi terlihat satu atribut yang memiliki korelasi sangat rendah yaitu x56 dengan nilai

communalities 0,174. Berdasarkan penjelasan mengenai interpretasi keeratan hubungan Guilford (Setiawan, 2014:103) nilai korelasi 0 sampai < 0,20 merupakan korelasi yang sangat rendah (*slight correlation*) sehingga hubungan tersebut bisa diabaikan. Penulis pun mereduksi atribut proses pemeriksaan singkat (x56) dan mengulang kembali proses analisis. Dengan demikian, atribut pada komponen ini hanya bersisa lima atribut. Adapun rincian hasil pengujian disajikan pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 25
Kmo And Bartlett's Test

<i>Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.</i>		0.865
<i>Bartlett's Test of Sphericity</i>	<i>Approx. Chi-Square</i>	357.613
	<i>Df</i>	10
	<i>Sig.</i>	0.000

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner menggunakan program SPSS 20.

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *KMO* $MSA > 0,5$ yaitu 0,865 dengan signifikan *Bartlett's test of sphericity* 0,000. Untuk itu komponen ini dianggap layak untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Tabel 26
Anti-Image Matrices

		x52	x53	x54	x55	x57
<i>Anti-image Correlation</i>	x52	0.913^a	-0.162	0.036	-0.266	-0.186
	x53	-0.162	0.827^a	-0.494	-0.257	-0.325
	x54	0.036	-0.494	0.836^a	-0.336	0.021
	x55	-0.266	-0.257	-0.336	0.877^a	-0.175
	x57	-0.186	-0.325	0.021	-0.175	0.902^a

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner menggunakan program SPSS 20.

Berdasarkan hasil uji *anti-image matrices* terhadap komponen pemeriksaan pajak diatas dijelaskan bahwa semua atribut memiliki *MSA* > 0,5. Rincian capaian nilai a pada atribut-atribut tersebut adalah x52 dengan nilai 0,913, x53 dengan nilai 0,827, x54 dengan nilai 0,836, x55 dengan nilai

0,877, dan x57 dengan nilai 0.902. Oleh karena nilai *MSA* semua atribut >0.5 maka semua atribut layak untuk diadakan analisis *communalities*. Uji *communalities* bertujuan untuk melihat bagaimana keeratan hubungan sebab akibat masing-masing atribut terhadap kepatuhan wajib pajak seperti berikut ini:

Tabel 27
Communalities

Penjelasan Setiap atribut	Hasil Ekstraksi	Korelasi
Pemeriksaan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) rutin dilaksanakan (x53)	0.841	Kuat
Pemeriksaan terhadap penunggak sanksi denda pajak rutin dilaksanakan (x55)	0.805	Kuat
Pemeriksaan terhadap wajib pajak yang terlambat membayar rutin dilaksanakan (x54)	0.744	Kuat
Adanya pengawasan dari pemeriksa pajak (x57)	0.670	Cukup kuat
Teknologi informasi canggih, penunggak pajak mudah dideteksi keberadaannya (x52)	0.599	Cukup kuat
<i>Mean</i>	0.732	Kuat

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner menggunakan program SPSS 20.

Berdasarkan hasil uji *communalities* di atas, dijelaskan dari seluruh atribut pada komponen ini terdapat tiga atribut yang memiliki pengaruh kuat terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu pemeriksaan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) rutin dilaksanakan, pemeriksaan terhadap penunggak sanksi denda pajak rutin dilaksanakan, dan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang terlambat membayar rutin dilaksanakan. Kemudian terdapat juga dua faktor yang pengaruhnya cukup kuat terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu, adanya pengawasan dari pemeriksa pajak dan teknologi informasi canggih, penunggak pajak mudah dideteksi keberadaannya. Rata-rata korelasi komponen ini terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,732. Dengan demikian komponen pemeriksaan pajak berpengaruh kuat terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 28
Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	3.658	73.150	73.150	3.658	73.150	73.150
2	.514	10.289	83.440			
3	.414	8.281	91.721			
4	.238	4.754	96.475			
5	.176	3.525	100.000			

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner menggunakan program SPSS 20.

Tabel diatas menjelaskan bahwa hanya satu faktor yang terbentuk dari komponen pemeriksaan pajak ini. Namun varians kontribusi komponen ini terhadap kepatuhan wajib pajak cukup besar yaitu 73,150%. Untuk melihat posisi masing-masing atribut yang terbentuk dalam komponen yang bersesuaian maka penulis menyajikan dalam tabel *component matrix a*.

Tabel *component matrix a* memperlihatkan keseluruhan komponen berada pada kolom komponen 1. Hal itu menegaskan seluruh atribut yang ada membentuk satu komponen saja seperti yang terinci dalam tabel berikut:

Tabel 29
Component Matrix A

	<i>Component</i>	
	1	
x52		0.774
x53		0.917
x54		0.862
x55		0.897
57		0.818

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner menggunakan program SPSS 20.

6. Pengetahuan Pajak

Langkah-langkah yang kita lakukan pada komponen sebelumnya juga kita lakukan pada komponen pemeriksaan pajak ini. Adapun rincian

hasil pengujian disajikan pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 30
Kmo And Bartlett's Test

<i>Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.</i>		0.894
<i>Bartlett's Test of Sphericity</i>	<i>Approx. Chi-Square</i>	791.628
	<i>Df</i>	66
	<i>Sig.</i>	0.000

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner menggunakan program SPSS 20.

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai KMO MSA > 0,5 yaitu 0,894 (*meritorious*) dengan signifikan *Bartlett's test of spehericity* 0,000. Langkah selanjutnya adalah menilai kelayakan masing-masing atribut pada komponen ini. Uji kelayakan tersebut menggunakan uji *anti-image matrices*.

Berdasarkan hasil uji *anti-image matrices* terhadap komponen pengetahuan pajak di bawah ini dijelaskan bahwa semua atribut memiliki MSA > 0,5. Rincian capaian nilai a pada atribut-atribut tersebut adalah x61 dengan nilai a 0,910, x62 dengan nilai 0,916, x63 dengan nilai 0,895, x64 dengan nilai 0,924, x65 dengan nilai 0,889, x66 dengan nilai 0,912, x67 dengan nilai 0,934, x68 dengan nilai 0,835, x69 dengan nilai 0,845, x610 dengan nilai 0,947, nilai x611 dengan nilai 0,844 dan terakhir x612 dengan nilai 0,802. Rincian tabel dapat dilihat pada tabel *anti image matrices* berikut ini :

Tabel 31
Anti-Image Matrices

		x61	x62	x63	x64	x65	x66	x67	x68	x69	x610	x611	x612
<i>Anti-image Correlation</i>	x61	0.910^a	-0.085	-0.258	-0.043	0.071	-0.040	-0.006	-0.346	0.136	-0.153	-0.051	0.025
	x62	-0.085	0.916^a	-0.171	0.101	-0.238	-0.125	-0.007	-0.072	0.032	0.045	-0.136	0.145
	x63	-0.258	-0.171	0.895^a	-0.087	-0.142	0.262	-0.076	-0.087	-0.027	-0.233	0.139	-0.179
	x64	-0.043	0.101	-0.087	0.924^a	-0.394	-0.233	-0.121	-0.070	0.050	-0.196	-0.059	-0.131
	x65	0.071	-0.238	-0.142	-0.394	0.889^a	-0.191	-0.302	0.193	-0.215	-0.070	-0.008	0.042
	x66	-0.040	-0.125	0.262	-0.233	-0.191	0.912^a	-0.257	-0.172	0.053	-0.014	-0.077	-0.006
	x67	-0.006	-0.007	-0.076	-0.121	-0.302	-0.257	0.934^a	-0.121	0.090	0.041	-0.137	0.040
	x68	-0.346	-0.072	-0.087	-0.070	0.193	-0.172	-0.121	0.835^a	-0.600	-0.112	0.164	-0.015
	x69	0.136	0.032	-0.027	0.050	-0.215	0.053	0.090	-0.600	0.845^a	-0.178	-0.091	0.065
	x610	-0.153	0.045	-0.233	-0.196	-0.070	-0.014	0.041	-0.112	-0.178	0.947^a	-0.145	-0.048
	x611	-0.051	-0.136	0.139	-0.059	-0.008	-0.077	-0.137	0.164	-0.091	-0.145	0.844^a	-0.435
	x612	0.025	0.145	-0.179	-0.131	0.042	-0.006	0.040	-0.015	0.065	-0.048	-0.435	0.802^a

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner menggunakan program SPSS 20.

Karena semua atribut memiliki nilai a > 0,5 maka semua atribut layak diikutsertakan dalam proses selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah menganalisis keterkaitan masing-masing atribut dari

komponen ini terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji ditunjukkan dalam tabel *communalities* berikut ini :

Tabel 32
Communalities

Penjelasan Setiap atribut	Ekstraksi	Korelasi
Tahu prosedur pemeriksaan pajak (x612)	0.837	Kuat
Tahu jatuh tempo pembayaran dengan benar (x65)	0.806	Kuat
Tahu tata cara pelaporan perubahan nilai objek pajak (x68)	0.797	Kuat
Tahu jangka waktu pembayaran (x64)	0.773	Kuat
Tahu tata cara pembayaran yang benar (x66)	0.746	Kuat
Tahu tempat pembayaran (x67)	0.745	Kuat
Tahu tarif denda pajak (x610)	0.735	Kuat
Tahu sanksi-sanksi pajak (x611)	0.712	Kuat
Tahu tarif pengenaan pajak (x69)	0.665	Cukup kuat
Tahu fungsi-fungsi pajak (x63)	0.658	Cukup kuat
Tahu peraturan pajak dengan benar, lengkap, dan jelas (x61)	0.650	Cukup kuat
Tahu membayar PBB P2 merupakan kewajiban sebagai warga negara (x62)	0.512	Cukup kuat
<i>Mean</i>	0.720	Kuat

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner menggunakan program SPSS 20.

Berdasarkan *communalities* di atas, terdapat 8 (delapan) atribut yang pengaruhnya kuat terhadap kepatuhan wajib pajak seperti : tahu prosedur pemeriksaan pajak, tahu jatuh tempo pembayaran dengan benar, tahu tata cara pelaporan perubahan nilai objek pajak, tahu jangka waktu pembayaran, tahu tarif denda pajak, dan tahu sanksi-sanksi pajak. Kemudian terdapat juga empat atribut cukup kuat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain, tahu tarif pengenaan pajak, tahu fungsi-fungsi

pajak, tahu peraturan pajak dengan benar, lengkap, dan jelas, serta tahu membayar PBB P2 merupakan kewajiban warga negara. Rata-rata korelasi komponen ini terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,720.

Tahap selanjutnya adalah ekstraksi seluruh komponen yang tersisa untuk menghasilkan sejumlah faktor dari data yang ada. Hasil ekstraksi komponen pengetahuan pajak ini adalah sebagai berikut :

Tabel 33
Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	6.351	52.924	52.924	6.351	52.924	52.924
2	1.283	10.691	63.615	1.283	10.691	63.615
3	1.002	8.349	71.964	1.002	8.349	71.964
4	0.689	5.738	77.702			
5	0.572	4.763	82.465			
6	0.494	4.119	86.584			
7	0.413	3.444	90.028			
8	0.336	2.798	92.826			
9	0.261	2.174	95.000			
10	0.248	2.070	97.070			
11	0.202	1.684	98.754			
12	0.150	1.246	100.000			

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner menggunakan program SPSS 20.

Tabel di atas menjelaskan bahwa uji ekstraksi menghasilkan 3 kategori (komponen) yang baru dari seluruh atribut pengetahuan pajak yang ada. Hal ini dilihat dari nilai *eigenvalues* > 1 terdiri dari 3 kategori. Total kontribusi komponen pengetahuan

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 71,964 %. Berikut ini merupakan tabel hasil rotasi yang membantu memposisikan atribut-atribut yang bersesuaian.

Tabel 33
Total Variance Explained

	<i>Component</i>		
	1	2	3
x61	0.763	0.226	0.127
x62	0.311	0.642	-0.061
x63	0.746	0.234	0.215
x64	0.430	0.682	0.351
x65	0.355	0.794	0.222
x66	0.234	0.810	0.189
x67	0.284	0.783	0.225
x68	0.835	0.316	0.021
x69	0.757	0.300	0.046
x610	0.704	0.370	0.319
x611	0.079	0.405	0.736
x612	0.188	0.038	0.895

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner menggunakan program SPSS 20.

Berdasarkan tabel rotasi diatas, terlihat komponen yang bersesuaian berada pada kolom komponen yang sama. Varians kontribusi masing-masing komponen tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Varians faktor yang masuk dalam kategori I (Faktor I) adalah sebesar 52,924%, hal ini berkelompok yang terdiri dari:
 - a. Tahu tata cara pelaporan perubahan nilai objek pajak;
 - b. Tahu tarif denda pajak;
 - c. Tahu tarif pengenaan pajak;
 - d. Tahu fungsi-fungsi pajak;
 - e. Tahu peraturan pajak dengan benar lengkap, dan jelas.
- 2) Varians faktor yang masuk dalam kategori II (Faktor II) adalah sebesar 10,691%, hal ini berkelompok yang terdiri dari:
 - a. Tahu jatuh tempo pembayaran dengan benar;
 - b. Tahu jangka waktu pembayaran;
 - c. Tahu tata cara pembayaran yang benar;
 - d. Tahu tempat pembayaran;
 - e. Tahu membayar PBB P2 merupakan kewajiban sebagai warga negara.
- 3) Varians faktor yang masuk dalam kategori III (Faktor III) adalah sebesar 8,349%, hal ini berkelompok yang terdiri dari:
 - a. Tahu prosedur pemeriksaan pajak;
 - b. Tahu sanksi-sanksi pajak.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa enam komponen yang terdiri dari kondisi sistem administrasi perpajakan, tarif pajak, penegakan hukum pajak, pemeriksaan

pajak, pelayanan pada wajib pajak dan pengetahuan pajak memiliki keterkaitan/hubungan yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak PBB P2 di Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi. Selanjutnya ditemukan hambatan-hambatan yang berpengaruh terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Bajenis seperti: Penegakan hukum belum dapat menyentuh wajib pajak yang tidak sedang membutuhkan layanan publik dari Pemerintah khususnya di Kecamatan Bajenis apalagi wajib pajak tersebut tidak berdomisili di Kecamatan Bajenis; Belum adanya SOP dan SPM pelayanan pajak di Kota Tebing Tinggi maupun di Kecamatan Bajenis; Ketidaksamaan kuantitas pengetahuan petugas pajak antara satu sama lain menyebabkan kurang maksimalnya upaya petugas dalam melayani dan memberikan pengetahuan PBB P2 kepada wajib pajak; Minimnya pengetahuan wajib pajak terhadap PBB P2; Minimnya aktivitas pemeriksaan bagi wajib pajak tidak patuh misalnya wajib pajak yang menunggak pajak dan sanksi denda pajak; Minimnya fasilitas dan Teknologi PBB P2 masih minim sementara perkembangan teknologi begitu pesat saat ini.

2. Rekomendasi

Beberapa saran yang dapat penulis rekomendasikan antara lain perlunya menambah frekuensi kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi pihak-pihak terkait dalam penegakan hukum, mengadakan kegiatan sosialisasi PBB P2 di Kecamatan Bajenis untuk menambah pengetahuan wp terhadap PBB P2, perlunya perbaikan data wajib pajak, memperbaharui data wajib pajak, memanfaatkan akun media sosial atau informasi lain yang memudahkan petugas untuk memberikan pelayanan, baik itu sosialisasi peraturan, informasi

tunggakan, pemeriksaan pajak, penegakan hukum pajak dan hal-hal lain yang berhubungan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Bajenis. Inovasi pelayanan dengan pelayanan berbasis teknologi informasi seperti SMS Center/SMS Gateway, Media sosial, Pembuatan grup *what'sapp*, *line*, *akun instagram*, *blog*, *facebook* dan media sosial lain yang gratis akan menjadi inovasi yang cukup murah ataupun aplikasi online.

REFERENSI

- Abuyamin, O. 2014. *Pilar-Pilar Perpajakan*. Bandung: Adoya Mitra Sejahtera.
- Hair.et al. 1998. *Multivariate Analysis*. Prentice-Hall International: USA.
- Notoatmodjo, S. 2007. *Promosi Kesehatan dan Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tiana, D. S. 2012. *Kebijakan Penetapan Barang Publik dan Swasta*. Bandung: STIA LAN Bandung Press
- Setiawan, B. 2005. *Aplikasi Analisis Faktor Dengan Menggunakan Principal Component And Bartlett's Test Of Sphericity (Studi Kasus Proses Pendidikan Di STIA-LAN Bandung*, Jurnal Ilmu Administrasi. No.4 Vol.2, Bandung: STIA LAN RI.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Perda Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang PBB P2
- Setiawan, Budi. 2014. *Statistika Dalam Penguraian Dan Pemecahan Masalah Manajemen Publik dan Bisnis*.
- Laporan Realisasi Pajak Kecamatan Bajenis Tahun 2013,2014, 2015.
- Laporan tunggakan PBB P2 Kota Tebing Tinggi BPKPAD Kota Tebing Tinggi Tahun 2015.
- Laporan Sanksi Denda PBB P2 Kota Tebing Tinggi BPKPAD Kota Tebing Tinggi Tahun 2015.